

**PENGARUH KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN
KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DESA**

**Amanda Mutiara Sweetenia
Eka Pinditya Ayu Caesari
Arum Frida Aprillia
Anissa Hakim Purwantini***

* anissa.hakim@ummgl.ac.id

Universitas Muhammadiyah Magelang
Jalan Tidar 21 Magelang

ABSTRACT

This study empirically investigates the factors that influences accountability of village governments in managing the Allocation of Village Funds in terms of Competency of the village apparatus, Internal Control System, Quality of presentation of financial statements. The sampling technique used in this research is purposive sampling, which is the official of the local government budget team in each sub-district within the scope of Magelang Regency. Based on survey responses from 150 respondents, the results show that Internal Control System and the quality of presentation of financial statements affect the accountability of management of ADD in Magelang regency. Meanwhile, competency has no effects on the accountability of managing the the Allocation of Village Funds.

Keywords: *allocation of village funds, competency, internal control system, quality of financial statement presentation, accountability*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri Dana Desa dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap desa yang ada di Indonesia untuk secara mandiri melakukan pengelolaan ADD. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009), pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Faktor penting lain dalam mengelola keuangan desa adalah sistem pengendalian yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah Desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa tersebut. Berdasarkan *Indonesia Action Corruption Forum* (IACF 2010) menjelaskan bahwa potensi-potensi penyalahgunaan dana Desa disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah Desa dan sistem pengendalian internal. Di sisi lain berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 pemerintah Desa akan diberikan dana untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bila mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa alokasi dana yang diberikan ke masing-masing Desa sangat besar yakni dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016 jumlah aduan dugaan penyelewengan Dana Desa mencapai 300 aduan. Dari data yang ada tersebut, pelakunya rata-rata dilakukan oleh Kepala Desa. Di Jawa Tengah ada 7.809 desa dan dana desa yang dikucurkan pada tahun 2015 sebesar Rp2,2 triliun. Tahun 2016 sebanyak Rp5 triliun, dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp6,3 triliun. Penggunaan dana desa di Jawa Tengah cukup optimal, tetapi masih ada penyalahgunaan dana desa. Bentuk penyalahgunaannya antara lain kegiatan fiktif, *mark up* harga, *mark up* jumlah, belanja fiktif, tidak ada laporan pertanggungjawabn penggunaan, dan penggunaan untuk keperluan pribadi atau golongan.

Studi terdahulu terkait akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan oleh Arifiyanto (2014) dan Wida, dkk (2017). Akan tetapi, penelitian tersebut berfokus pada implementasi akuntabilitas dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian Listiyani (2016) mengkaji efektivitas implementasi kebijakan penggunaan dana desa tahun 2015 di Desa Gunungpring, Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang termasuk dalam daerah yang menerima dana desa terbesar di Jawa Tengah. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dana desa pada tahun tersebut difokuskan untuk pembangunan fisik saja. Oleh karena itu, perlu analisis mengenai prioritas permasalahan desa yang sebenarnya agar ADD dapat optimal dan tepat sasaran. Widyatama, dkk (2017) menguji faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD yaitu kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Widyatama, dkk (2017) dengan menambahkan variabel penyajian laporan keuangan. Pemerintah desa harus mampu melaksanakan akuntabilitas terhadap pengelolaan ADD melalui penyajian laporan

keuangannya. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka dapat meningkatkan akuntabilitas (Nurlaili, 2016). Penelitian ini penting karena mengkaji tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa dari segi Kompetensi dari para aparatur desa, Sistem Pengendalian Internal yang berlaku, dan kualitas penyajian laporan keuangan. Ketika faktor yang memengaruhi akuntabilitas dapat teruji secara empiris, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan faktor tersebut agar tercipta pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala likert 5 poin. Skala likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan persepsi responden terhadap kejadian tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari responden dengan memberikan pertanyaan di dalam kuesioner.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini aparatur pemerintah desa di dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Magelang. *Sampling method* menggunakan *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan yaitu: (1) pejabat yang berkaitan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yaitu Kepala Desa, Sekretaris, Kabid, Kasubbag, dan Bendahara, (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah termasuk dalam urutan 2 desa yang memperoleh ADD tertinggi di setiap kecamatan. Total kecamatan di Kabupaten Magelang terdapat 21 kecamatan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik survei yaitu dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada responden sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini adalah upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan harus dilakukan secara terbuka dan transparan melalui musyawarah desa dan mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa. Variabel ini diukur menggunakan skala 5 point, dimana skala sangat tidak setuju (1) dan skala sangat setuju (5). Instrumen yang digunakan mengadopsi penelitian (Thomas,2013) yang terdiri dari 3 indikator dengan 8 item pernyataan pada indikator proses perencanaan, 4 item pernyataan pada proses pelaksanaan, dan 5 item pernyataan pada proses pertanggungjawaban.

Kompetensi Aparatur (X1)

Kompetensi merujuk kepada pengetahuan (knowledge), keahlian (skills) dan kemampuan (abilities), yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu (Rudana, 2005:6). Indikator kompetensi aparatur meliputi kemampuan mengelola administrasi keuangan, menyusun, memberi nomor, dan menyimpan bukti transaksi serta input transaksi kode akun, kode mata anggaran, serta mencocokkan dengan saldo kas. Variabel ini diukur menggunakan skala 5 point, dimana skala sangat tidak setuju (1) dan skala sangat setuju (5). Instrumen yang digunakan berdasarkan penelitian Thomas (2013).

Sistem Pengendalian Internal (X2)

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Indikator dalam variabel ini adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian internal. Variabel ini diukur menggunakan skala 5 point, dimana skala sangat tidak setuju (1) dan skala sangat setuju (5). Instrumen yang digunakan mengadopsi penelitian (Thomas,2013) yang terdiri dari 9 item pernyataan.

Penyajian Laporan Keuangan (X3)

Definisi penyajian laporan keuangan dalam penelitian ini adalah representasi terstruktur posisi keuangan alokasi dana desa akibat transaksi yang dilakukan selama periode tertentu. Laporan keuangan disusun tepat waktu dan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi dalam ADD sehingga mudah dipahami pengguna. Variabel ini diukur menggunakan skala Likert 5 point, dimana skala sangat tidak setuju (1)

dan skala sangat setuju (5). Instrumen yang digunakan mengadopsi penelitian (Thomas,2013) yang terdiri dari 8 item pernyataan.

Metode Analisis Data

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas merupakan pengujian untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner valid jika item pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Pada penelitian ini uji validitas diukur dengan korelasi antara skor tiap butir pernyataan dengan jumlah skor seluruh pernyataan. Nilai signifikansi dari *pearson correlation* di bawah 0,05 maka indikator dinyatakan valid (Ghozali, 2013:52).

Uji reliabilitas menilai tingkat konsistensi kuesioner. Jika jawaban responden terhadap item pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung *croanbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal jika memberikan nilai *croanbach's alpha* lebih dari 0,70 (Ghozali, 2013:40).

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi linear berganda. Rumus yang digunakan yaitu:

$$AKDD = \alpha + \beta_1KOM + \beta_2SPI + \beta_3PLK + e$$

AKDD = Akuntabilitas Pengelolaan ADD

KOM = Kompetensi

SPI = Sistem Pengendalian Internal

PLK = Penyajian Laporan Keuangan

α = konstanta

β_1 - β_3 = koefisien Regresi

e = eror

Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Besarnya koefisien 0 sampai 1, semakin mendekati 0 koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel

bebas, sebaliknya mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2013: 97).

Uji F (*Goodness of fit test*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak (Ghozali, 2013:97). *Rule of thumb* uji F yaitu:

Ho diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

Ha diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan (Ghozali, 2013:98). Kesimpulan hasil pengujian analisis uji t berpengaruh positif adalah sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $P\ value < \alpha = 0,05$ maka Ho ditolak dan Ho diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $P\ value > \alpha = 0,05$ maka Ho diterima dan Ho ditolak berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pejabat tim anggaran pemerintah daerah pada desa di setiap kecamatan dalam lingkup Kabupaten Magelang, yang terdiri dari 21 kecamatan dan diambil dua desa yang menerima ADD dari setiap kecamatan untuk dijadikan sampel penelitian. Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 150 responden. Profil responden pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1
Profil Responden

Keterangan	Kriteria	Jumlah	Presentase
Jenis kelamin	a. Laki-laki	109	72%

	b. Perempuan	41	28%
	Jumlah	150	100%
Umur	a. 26-35 tahun	33	22%
	b. 36-45 tahun	58	39%
	c. 46-56 tahun	54	36%
	d. >55 tahun	5	3%
Pendidikan	a. SMA/SLTA/SMK	81	54%
	b. D3	23	15%
	c. S1	40	27%
	d. S2	2	1%
	e. Lainnya	4	3%
	Jumlah	150	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya suatu kuesioner. Penyusunan ini dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tepat. Instrumen dikatakan valid jika koefisien korelasi (r) hitung yang bernilai lebih besar dari r tabel, yaitu diatas 0,159 ($r > 0,159$). Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai koefisien korelasi dengan skor total seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,159. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dalam instrumen penelitian tersebut valid.

2. Uji Reliabilitas

Hasil pengujian validitas yang tersaji pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach alpha* di setiap variabel $>0,7$ Ghazali (2013), sehingga setiap kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Hasil
AKDD	0,747	Reliabel
KOM	0,854	Reliabel
SPI	0,762	Reliabel
PLK	0,780	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

3. Analisis Regresi Linier berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh

kompetensi, sistem pengendalian internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas. Hasil analisis regresi linier berganda di sajikan pada tabel 3

Tabel 3. Tabel Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.971	.279		7.059	.000
	KOM	.073	.060	.099	1.226	.222
	SPI	.224	.103	.244	2.182	.031
	KPL	.274	.087	.332	3.150	.002

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$AKDD = 1,971 + 0,073 \text{ KOM} + 0,224 \text{ SPI} + 0,274 \text{ PLK} + e$$

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 4. Uji Adjusted R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,604 ^a	,365	,352	,28054

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil Uji R Square pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai R square 0,352. Hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan ADD dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi, sistem pengendalian internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan sebesar 35,2 % sedangkan sisanya sebesar 64,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Uji F

Tabel 5. Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	6.604	9	2.201	27.972	.000 ^b
	Residual	11.491	146	.079		
	Total	18.095	149			

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Tabel 5 menunjukkan Uji F signifikansi pada 0,000. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model penelitian dalam studi ini telah layak.

Uji t

Tabel 6. Uji t

Hipotesis	Variabel	t	Sig	Keterangan
H1	KOM	1.226	.222	Tidak Terdukung
H2	SPI	2.182	.031	Terdukung
H3	PLK	3.150	.002	Terdukung

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa variabel kompetensi memiliki nilai signifikansi $p\text{-value} = 0,222 > 0,05$ sehingga H1 tidak terdukung. Sedangkan pengendalian internal dan kualitas penyajian laporan keuangan memiliki nilai signifikasni $< 0,05$ sehingga H2 dan H3 terdukung.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil penujian menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa di Kab. Magelang. Kompetensi aparatur pemerintah desa dalam penelitian ini hanya mengukur kemampuan dalam mengelola administrasi keuangan saja seperti menyusun, memberi nomor, dan menyimpan bukti-bukti transaksi, dan input transaksi kode akun, kode mata anggaran, serta mencocokkan dengan saldo kas. Dalam implementasi pengelolaan dana desa tidak hanya dibutuhkan kompetensi secara teknis saja. Akan tetapi pemahaman terhadap aturan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa menjadi hal krusial. Aparat desa harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam menentukan jenis kegiatan untuk alokasi dana desa yang sesuai dengan aturan. Sehingga dapat berkontribusi bagi pengembangan

masyarakat dan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang baik. Selain itu, perangkat desa harus memiliki kompetensi untuk merumuskan tantangan dalam pengelolaan ADD sehingga mampu menyusun dan melaksanakan prioritas pembangunan desa dengan tepat dan adil. Pemerintah Kabupaten Magelang terus berupaya melakukan berbagai program untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa seperti pendampingan dan bimbingan teknis Sistem Keuangan Desa dan aplikasi OMSPAN (*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara*). Hasil penelitian ini konsisten dengan Widyatama, dkk (2017) yang tidak menemukan bukti empiris pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif, yang artinya semakin baik sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh aparat yang berwenang maka akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa di lingkup Kabupaten Magelang telah memiliki struktur organisasi yang jelas. Kejelasan struktur organisasi ini akan memudahkan pemisahan tugas dan wewenang dalam menjalankan program dari alokasi dana desa, contohnya sudah dilakukan otorisasi atas aktivitas yang berkaitan dengan transaksi ADD. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melaksanakan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang secara berkala. Lebih lanjut, pengeluaran uang pada pemerintah desa telah didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas. Setiap hasil temuan / *review* dan saran yang diberikan oleh inspektorat akan segera ditindaklanjuti oleh aparat pemerintah desa. Komunikasi telah dilaksanakan secara baik dan terbuka. Pemerintah desa menyebarluaskan informasi ringkasan APBDes di beberapa tempat strategis dalam masing-masing desa dalam rangka transparansi anggaran. Pada pemerintah desa di Kabupaten Magelang, pengendalian internal guna mengantisipasi adanya penyimpangan bantuan keuangan desa dilakukan dengan pengoptimalan peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dengan didampingi pihak Kejaksaan Negeri yaitu TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah). Adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magelang

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif, yang artinya semakin baik kualitas penyajian laporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa di kabupaten Magelang. Berdasarkan kuesioner hasil riset menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah telah menyajikan laporan keuangan desa yang memuat informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan pertanggungjawaban. Selain itu laporan keuangan desa disajikan tepat waktu dan wajar serta kekeliruan dalam penggunaan dapat dicegah. Lebih lanjut, penyajian laporan keuangan desa menggunakan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan terkait penggunaan ADD yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna. Ketika kualitas laporan keuangan dana desa baik, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa khususnya bidang administrasi keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut harus dapat diakses oleh semua pihak sehingga akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menginvestigasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa dari segi Kompetensi dari para aparatur desa, Sistem Pengendalian Internal yang berlaku, Kualitas penyajian laporan keuangan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana. Dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sistem pengendalian internal dan kualitas penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keterbatasan dan Saran

- 1) Peneliti tidak dapat mengontrol apakah kuesioner diisi oleh responden sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Saran penelitian selanjutnya dapat menambahkan wawancara secara langsung untuk mengkonfirmasi jawaban sehingga mendapatkan kesimpulan yang jelas dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner secara tertulis.
- 2) Penelitian ini hanya mencakup desa di wilayah Kabupaten Magelang, sehingga generalisasi terhadap hasil penelitian perlu kehati-hatian. Ruang lingkup wilayah

penelitian untuk penelitian yang akan datang dapat dilakukan di wilayah yang lebih luas agar hasil penelitian dapat lebih baik.

- 3) Kompetensi pada riset ini hanya berfokus pada administrasi keuangan secara teknis. Riset selanjutnya dapat menggunakan kompetensi aparatur secara keseluruhan dalam pengelolaan ADD terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Ristekdikti) atas dana yang telah diberikan melalui program PKM-Penelitian sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksi-Corruption Forum (IACF) tahun 2010.
- Arifiyanto, Dwi Febri. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2 (3): 473-485.
- Bpk.go.id (diakses tanggal 18 November 2017)
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grimmelikhuijsen, S. 2013. *A good man but a bad wizard. About the limits and future Transparency of democratic governments. Information Policy* 17: 293–302.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2005 : 26*
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure* Available at SSRN 94043. https://doi.org/10.1007/978-94-009-9257-3_8
- Jermias, J., dan T. Setiawan. 2008. *The moderating effects of hierarchy and control Systems on the relationship between budgetary participate on and performance. The International Journal of Accounting* 43: 68–292.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Laswad, F., R. Fisher., dan P. Oyeler. 2005. *Determinants of voluntary Internet financial Reporting by local government authorities. Journal of Accounting and Public Policy* 24: 101–121.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.
- Listiyani, Rini. 2016. Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. *Adinegara*, Vol 5. No. 7.
- Mardiasmo, 2009. Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Mustofa, Anies Iqbal. 2012. *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765. Universitas Negeri Semarang.
- Nurlaili. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis). *JOM Fekon* Vol.3 No.1 (Februari) 2016

- Nordiawan Deddi. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi kedua. Salemba Empat. Jakarta. ----- 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014.
- Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014.
- Rudana, N. 2005. *Pengaruh Kompetensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar*. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Diponegoro.
- Sagala, R. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Rajawali Pers.
- Sulistiyani, A. T. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gava Media, Yogyakarta.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
- Uddin, S., dan T. Hopper. 2001. *A Bangladesh soap opera: Privatization, accounting and regimes of control in a less developed country*. *Accounting Organizations and Society* 26: 643-672.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
- Wida, Siti A., Djoko S., Taufik K. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 14 (2): 148:152.
- Widyatama, A., Lola Novita dan Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *STIE Panca Bhakti Palu. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 02, No. 02 (2017): 1-2